

PERAN KPSBU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI STRATEGI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

I Wayan Ruspendi Junaedi¹, I Wayan Damayana², Dermawan Waruwu³

¹²³ Universitas Dhyana Pura

Email: ruspendijunaedi@undhirabali.ac.id; damayana@undhirabali.ac.id; dermawanwaruwu@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Keterlibatan aktif masyarakat maupun lembaga usaha atau pengusaha di setiap daerah sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adat. Keterlibatan aktif ini bisa ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam koperasi. Salah satu bentuk usaha yang dikembangkan oleh masyarakat adat Sunda di Jawa Barat adalah Koperasi Peternak Susu Bandung Utara. Tujuan penelitian ini adalah (1). untuk mengetahui hal hal apa yang di fasilitasi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) bagi anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat. (2). untuk mengetahui apa yang dilakukan anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*mix method*) dengan tipe penelitian case study. Data dikumpulkan dan dianalisis secara observation, wawancara, dan dokumen. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat adat Sunda tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan susu sapi segar yang diambil setiap pagi dan sore hari. Kehidupan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan adatnya melalui Koperasi peternak KPSBU.

Kata Kunci: Adat, Ekonomi, KPSBU, Pemberdayaan, Peran.

1. Pendahuluan

Keterlibatan aktif masyarakat maupun lembaga usaha atau pengusaha di setiap daerah sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adat. Keterlibatan aktif ini bisa ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam koperasi, pemberian modal, menjadi pelaku usaha, dan adanya iuran yang dibebankan kepada anggotanya. Salah satu bentuk usaha yang dikembangkan oleh masyarakat adat Sunda di Jawa Barat adalah Koperasi Peternak Susu Bandung Utara, seperti terlihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Suasana Aktivitas Masyarakat dan Koperasi di Jawa Barat (Sumber:Dokumen Tim Peneliti, 2020)

Kegiatan usaha peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat adat Sunda di atas yang bekerja sama dengan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang. Usaha kecil di sektor informal memiliki biaya yang sangat rendah, memiliki profit margin, memakai perjanjian negosiasi di luar sistem hukum, dan memberikan upah minimum (Nafziger, 2012). Usaha kecil di sektor informal seringkali kurang efisien dalam berinvestasi dibandingkan sektor formal (Bigsten, 2018). Biasanya usaha kecil kurang mampu dalam membaca peluang pasar, kelemahan permodalan, kelemahan manajerial, termasuk kelemahan dalam memperoleh informasi akses pasar (Sabirin, 2016).

Kerja sama yang terjalin antara masyarakat adat dengan pengusaha atau koperasi dapat menguatkan dan membangun perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia. Pengelolaan usaha masyarakat adat seperti pasar tradisional, koperasi, perbankan, pengelolaan objek wisata, dan sebagainya dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan hasil pekerjaannya sekalipun bersifat informal. Sektor informal memainkan peran dalam memecahkan masalah kemiskinan (Todaro, 2012). Sektor informal berkorelasi kuat dengan pembangunan ekonomi (Pratap, 2009). Sektor informal sangat diminati oleh penduduk yang berprofesi sebagai pengusaha. Human kapital di sektor informal seringkali menimbulkan *negative externalities*, sehingga pemerintah mengurangnya melalui *special taxes and regulation* (LeRoy, 2011).

Keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat adat dapat menjadi model bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Penerapan model pemberdayaan ekonomi adat dapat memacu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya model ini, maka kemiskinan di Indonesia, secara khusus di wilayah masyarakat adat dapat diatasi secara serius dan berkelanjutan. Kehidupan perekonomian atau bidang usaha dalam bentuk apapun tidak terlepas dari adat-istiadat atau budaya yang dianut oleh masyarakat pada setiap daerah di Indonesia. Tingkat kewirausahaan seseorang sangat bervariasi sesuai dengan budaya atau adat-istiadat yang dianut oleh setiap masyarakat (Lambing, 2000). Apalagi dipengaruhi oleh setting budaya feodalistik, sehingga sumber daya didominasi oleh tuan tanah (Beets, 1990). Dengan demikian, adat sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi suatu daerah dan bahkan peningkatan pembangunan ekonomi nasional.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari lembaga-lembaga ekonomi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Konsep yang dikembangkan dalam *New Institutional Economics* (NIE) dengan landasan yang berusaha membangun gagasan tentang kelembagaan dan organisasi dengan tujuan untuk mencapai tingkat efisiensi serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial dan legal yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Lingkungan kebijakan ekonomi sebagai lingkungan makro meliputi: aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak dalam kontrak (Budi, 2008).

Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakkan pihak ketiga (*rules of third party enforcement*) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk dapat menjalankan transaksi pasar (Erani, 2008). Kesepakatan kelembagaan mendekati istilah terpopuler disebut sebagai 'kelembagaan' (Erani, 2008). Fokusnya adalah transaksi individu yang terkait dengan organisasi atau budaya masyarakat. Dalam hal ini, adanya hubungan antara budaya dengan kewirausahaan serta budaya sangat berperan terhadap perkembangan kewirausahaan (Gamage, 2003); (Saffu, 2009).

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja yang di fasilitasi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) bagi anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat.
2. Apa yang dilakukan anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sebagai strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional?

Dari rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui hal hal apa yang di fasilitasi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) bagi anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*mix method*) serta tipe penelitian *grounded research* (Spradley, 2007) yang melakukan wawancara mendalam dengan teknik triangulasi kepada tokoh atau pengurus Koperasi di KPSBU Bandung dan pihak anggota KPSBU di Bandung. Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan suatu proses pencarian data yang bertujuan untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi dokumen/pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kehidupan perekonomian masyarakat adat di koperasi peternak susu Bandung Utara. Kemudian anggota KPSBU dan pelaku umkm diwawancarai secara mendalam yang menggunakan metode bola salju sampai pada titik jenuh penelitian terkait perekonomian masyarakat dan jenis pekerjaan serta usaha yang digelutinya selama ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan disusun sesuai pola-pola yang diinginkan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Koperasi Peternak Susu Bandung Utara di provinsi Jawa Barat. Provinsi ini memiliki lembaga KPSBU yang dapat dikelola untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya serta berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang Provinsi Jawa Barat salah satu cara meningkatkan perekonomian masyarakat Sunda pada khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Koperasi ini menampung atau memfasilitasi pekerjaan masyarakat Sunda yang sebagian besar bekerja pada sektor peternakan sapi. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat adat Sunda tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan susu sapi segar yang diambil setiap pagi dan sore hari.

KPSBU merupakan koperasi yang beranggotakan 7500 peternak yang mayoritas dari masyarakat Sunda. KPSBU hadir hampir 50 tahun di wilayah Bandung Utara dengan memfasilitasi peternak sebagai berikut:

- a. Menyalurkan susu dari peternak ke industri susu.
- b. Membantu peternak dalam supply bahan makanan sapi.
- c. Membantu peternak dalam pengadaan peralatan dan sarana pada kandang sapi.
- d. Membantu peternak secara gratis dalam penyediaan tenaga medis, obat-obatan gratis, dan suntik kawin gratis.
- e. Melakukan monitor 24 jam atas kesehatan ternak sapi milik anggota KPSBU dengan dokter hewan dan mantra hewan.
- f. Memberikan santunan dana kematian maupun pencurian ternak sebesar Rp6.000.000.
- g. Memberikan bantuan biaya melahirkan Cesar Rp. 6.000.000 dan biaya melahirkan normal 2 juta kepada para istri peternak.
- h. Memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga kepada peternak yang membutuhkan dana tanpa jaminan dan tanpa bunga dengan aturan maksimal 5 Juta.
- i. Memberikan pembinaan rutin kepada seluruh peternak dalam upaya peningkatan produksi susu.
- j. Membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun kepada seluruh anggota KPSBU.
- k. 1 Kepala Keluarga hanya boleh diwakilkan 1 anggota di KPSBU.
- l. Sekitar 90 persen hasil susu peternak disalurkan kepada industry, sementara 10 persen lainnya dikelola dalam bentuk Yogurt serta bentuk susu lainnya yang dijual secara terjangkau.
- m. Peternakan akan mendapat bayaran susu setiap 15 hari sekali.
- n. Pengambilan susu minimal 2 kali dalam sehari 07.00 wib dan 17.00 wib.
- o. Dibangun Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menangani resiko jatuhnya harga sapi saat sapi mati.
- p. Ada Bank Sperma di Lembang menghasilkan bibit-bibit sapi yang berkualitas.

Peternak diwajibkan menjaga kualitas susunya, dimana setiap hasil perah susu di tes dulu (jika susu rusak maka akan ditolak agar tidak merusak mesin melalui tes alcohol apakah susu ada pecah atau tidak). Metode pengembangan : Ada simpanan pokok Rp. 50.000 sekali bayar, simpanan wajib Rp. 10 per liter (tidak boleh diambil selama jadi anggota KPSBU) dan simpanan mana suka Rp. 5.000 per bulan. Sejarah berawal dari orang Italia dan orang Belanda ke Indonesia membawa sapi perah lebih dari 100 tahun pada perang dunia pertama. Dengan adanya dana CSR maka mampu memprioritaskan warga lembang bekerja di KPSBU, Pembangunan Jalan dan Rumah Ibadah dengan jumlah dana antara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000.

Walaupun Negara kita itu memiliki lahan yang luas dan subur, tetapi petanian di negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, beras sering diimpor dari luar negeri, kedelai dan buah buahan banyak didatangkan dari luar negeri. Petani hortikultura (sayuran) di negeri kita telah memiliki keahlian dalam produksi tetapi tidak memiliki keyakinan dalam pemasaran. Lembang sebagai sentra pertanian hortikultura semenjak lama, tidak memiliki sarana apabila terjadi overproduksi. Demikian juga peternakan unggas, saat ini peternakan unggas rakyat sudah banyak yang bangkrut yang tersisa

adalah peternakan besar integrator yang menguasai peternakan unggas dari mulai bibit, pakan, obat-obatan sampai pasca panen dan pengolahan.

Indeks ketahanan pangan Indonesia meningkat dari urutan 75 (2015) ke urutan 62 (2019) dari 113 negara. Perbaikan indeks ini disebabkan peningkatan impor pangan. Singapura Negara kecil tidak memiliki lahan pertanian memiliki indeks ketahanan pangan tertinggi di dunia karena 90 % kebutuhan pangan warganya didapat dari impor. (Kompas, Senin 3 Agustus 2020, hal:6). Kedaulatan pangan menempatkan petani dipuncak teratas arus besar pembangunan pertanian, kedaulatan pangan perlu didukung dengan melaksanakan reforma agraria sejati, melindungi petani kecil dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil, pendekatan budidaya agroekologis untuk peningkatan produksi, pengubahan sistem subsidi input dan berbagai bantuan lain menjadi transfer langsung dan perlindungan harga ditingkatkan usaha tani. (Kompas, Senin 3 Agustus 2020, hal:6).

Lumbung pangan nasional telah dicita-citakan oleh pemerintah, mulai pada masa Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah 1 juta hektar di lahan gambut mendatangkan 15.600 keluarga transmigran, menghabiskan Rp.3T, menyisakan kerusakan lingkungan. Presiden SBY dengan program food estate (lumbung pangan) di Ketapang 100.000 ha, di Bulungan 300.000 ha, di Merauke dengan program The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) seluas 1,23 juta ha dengan jargon feed the world dengan komoditi: padi, hutan tanaman industri, perkebunan sawit, tebu, dan jagung. Kegagalan MIFEE diulangi lagi oleh pemerintah saat ini dengan rencana pengembangan sawah 1,2 juta ha di Merauke yang berakhir dengan cerita yang sama. (Kompas, Senin 3 Agustus 2020, hal:6).

Pandemik ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan setiap negeri sangat penting, walaupun demikian tidak semua Negara mampu membangun swasembada pangan termasuk Negara kita. Walaupun secara teknis daya dukung alam dan kebijakan pemerintah mendukung untuk itu. Menurut Menteri Koperasi Teten Masduki, volume usaha Koperasi Pangan di Indonesia sangat rendah, volume usahanya kurang dari 8% dari total volume koperasi di negeri ini, optimalisasi koperasi pangan melalui program Kehutanan Sosial (Pikiran Rakyat, 1 Agustus 2020, hal: 5). Masalah pertanian rakyat di Indonesia masih menghadapi persoalan yang rumit, karena belum ada pengaturan, petani bebas menanam apa saja dan setelah panen timbul masalah karena harga jual sangat rendah. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hal ini, maka swasembada pangan tidak akan pernah kita capai.

Harga jual produk pertanian di negeri kita tidak bisa dijadikan pegangan, kadang-kadang harga jual mahal kadang murah. Ada momen tertentu yang bisa dijadikan patokan yaitu hari raya, biasanya para petani melakukan persiapan penanaman untuk dijual menjelang hari raya. Sayangnya pertanian kita belum ditata dengan baik, mahal dan murah harga jual tidak bisa dilihat hanya di satu daerah. Petani tidak bisa memprediksi hasil panen harganya baik atau buruk. Kadang-kadang petani mendapat harga yang baik karena kebetulan komoditi tersebut sedang langka dipasaran, tetapi sering harganya murah karena komoditi tersebut sedang melimpah dipasaran. Para masa covid 19 ini, dimana Horeka (hotel restoran dan katering) tidak buka jadi imbasnya bagi para petani sayur sangat dahsyat.

Hari raya idul fitri bertepatan dengan penerapan PSBB (pembatasan social bersekala besar) oleh pemerintah juga sangat berdampak dirasakan oleh para petani. Harga sayuran menjelang hari raya tidak sebaik tahun lalu penyerapannya hanya untuk rumah tangga sedangkan Horeka masih tutup. Harga jual hasil pertanian tidak didapatkan dari biaya produksi ditambah keuntungan, hampir semua produk pertanian ditentukan oleh pergerakan harga dipasar. Harga yang terjadi dipasaran adalah riil dan para petani harus berdamai dengan harga itu, kebanyakan harga itu tidak memberi kepuasan kepada petani, jadi petani harus melakukan efisiensi dalam proses produksinya. Kelemahan para petani semakin besar manakala para petani tidak memiliki kekuatan kolektif dan mambangun lembaga ekonomi yang kuat seperti koperasi, para tengkulak telah berhasil mengkotak kotak para petani dan terikat dan tergantung kepadanya, sehingga koperasi pertanian di Negara kita semakin sulit dibangun.

Resesi yang cukup mengawatirkan membayangin seluruh Negara, termasuk Negara kita, pertumbuhan ekonomi negatif menjadi hantu yang menakutkan, semua pemimpin Negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dampak resesi ini. Program pinjaman dari pusat telah disebarkan ke masing masing provinsi untuk mengungkit usaha kecil menengah (UKM), program belanja Negara secara besar besar akan dilakukan supaya roda ekonomi sedikit demi sedikit berputar. Beberapa pakar ekomomi menganalisa bahwa resesi ini disebabkan oleh kerakusan para pengusaha besar dalam berbisnis, munculnya para pengusaha besar tanpa ada pembatasan menyebabkan persaingan diantara mereka. Dunia kebanjiran barang barang, maka terjadi perang harga, sistim dumping dilakukan untuk memenangkan persaingan dan untuk menjatuhkan saingan bisnis. Barang sangat murah tetapi dimasa pandemik ini tidak ada yang beli karena semua orang memiliki uang terbatas.

Salah satu yang bisa dijadikan contoh koperasi pertanian adalah koperasi susu. Koperasi ini bergerak di sector riil, semua anggotanya adalah para peternak sapi perah. Peternakan sapi perah di Indonesia, baru memasok kebutuhan susu 20%, dan sebagian besar susu yang dibutuhkan nasional masih di impor 80%. Harga susu impor sangat ditentukan oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar USA. Pada masa pandemik ini, impor susu tersendat, juga nilai tukar terhadap dolar US rendah, harha susu impor mahal. Produksi susu yang masih rendah di dalam negeri membawa berkah, karena IPS (industry pengolahan Susu) atau pabrik susu jadi berburu bahan baku (susu murni) di dalam negeri. Peternakan sapi perah sampai saat ini belum/tidak terdampak dari pandemic , pemasn masih lancar dan proses produksi di tingkat peternak masih berjalan seperti biasa.



Gambar 2. Koperasi Peternakan Susu Segar Bandung Utara
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2020)

Jumlah Anggota KPSBU 7600 keluarga peternak sapi perah, 4200 diantaranya memiliki sapi dan aktif menjual susu, jumlah produksi susu per hari 130 ton, saat ini KPSBU Lembang bisa disebut Koperasi petanian terbesar di negeri ini. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang pemilik dan pengguna/pelangganya adalah anggota koperasi itu sendiri. Manakala seluruh anggota koperasi adalah para petani atau peternak dan mereka mampu melakukan proses produksi secara masal, kemudian kopearasi sebagai lembaga ekonomi milik petani berperan membantu dibidang pemasaran dan menyediakan sarana untuk proses produksi yang dibutuhkan oleh para petani, sangatlah langka kita temukan di negeri kita. Susu murni adalah komoditi cepat rusak, susu harus cepat didinginkan untuk menghambat perkembangan bakteri yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Bila susu terlambat didinginkan maka jumlah kuman akan terus bertambah dan akan memakan susu dan menimbulkan kerusakan pada susu.

Para peternak menghimpun dana secara mandiri berupa pemupukan modal dari simpanan anggota untuk menolong diri sendiri (*Self help*), modal tersebut diputuskan secara musyawarah dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk dialokasikan kepada program yang menambah kekuatan berkoperasi, berupa Mesin Pendingin, Tanki Susu, alat alat laboratorium, *milk can* dan lain-lain. Para peternak harus memiliki ternak sapi perah harus dipelihara dengan baik oleh pemiliknya. Setiap hari para peternak memproduksi susu, mereka melakukan pemerahan dari pagi sampai sore. Koperasi susu menjemput produksi susu dari produksi dari peternak kemudian di koperasi dilakukan pendinginan kemudian dipasarkan.



Gambar 3. Proses Pemerahan Susu Sapi Segar di Jawa Barat
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2020)

Masyarakat yang memelihara ternak sapi tidak kesulitan memasarkan hasil pemerahan susu sapi karena setiap pagi dan sore hari diambil oleh koperasi. Hal ini menunjukkan kerja sama antar masyarakat adat dengan pengusaha dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Sebagian besar peralatan yang digunakan untuk peternakan dan pemerahan susu sapi disediakan oleh koperasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Para peternak yang membutuhkan pakan konsentrat untuk sapi sapinya, maka koperasi , mengadakan pabrik pakan konsentrat. Para peternak rata rata memiliki sapi antara 3 sd 5 ekor per keluarga, tidak memiliki lahan rumput, para saat ini para peternak membutuhkan pakan rumput, beberapa koperasi sedang mencoba memproduksi pakan ternak rumput fermentasi (silase). Sapi perah yang dipelihara para peternak juga suka menderita sakit maka koperasi menyediakan layanan kesehatan hewan dan juga kawin suntik/inseminasi buatan. Dokter hewan dan mantri hewan banyak yang bekerja di

koperasi pesusuan. Bila sapi milik peternak harus diafkir karena menderita sakit atau sudah tua dan kurang produktif, maka koperasi menyediakan kredit untuk membeli sapi baru. Para peternak anggota koperasi juga membutuhkan layanan lain yaitu kebutuhan sembako dan pinjaman uang untuk kebutuhan sekolah anak anaknya disediakan oleh koperasi. Selain itu para peternak yang membutuhkan layanan kesehatan, maka koperasi telah memiliki layanan kesehatan khusus untuk para peternaknya.



Gambar 4. Peralatan Pemerahan Susu Sapi di Jawa Barat
(Dokumentasi: Tim Peneliti, 2020)

Para peternak yang membutuhkan pakan konsentrat untuk sapi sapinya, maka koperasi, mengadakan pabrik pakan konsentrat. Para peternak rata rata memiliki sapi antara 3 sd 5 ekor per keluarga, tidak memiliki lahan rumput, para saat ini para peternak membutuhkan pakan rumput, beberapa koperasi sedang mencoba memproduksi pakan ternak rumput fermentasi (silase). Sapi perah yang dipelihara para peternak juga suka menderita sakit maka koperasi menyediakan layanan kesehatan hewan dan juga kawin suntik/inseminasi buatan. Dokter hewan dan mantri hewan banyak yang bekerja di koperasi pesusuan. Bila sapi milik peternak harus diafkir karena menderita sakit atau sudah tua dan kurang produktif, maka koperasi menyediakan kredit untuk membeli sapi baru. Para peternak anggota koperasi juga membutuhkan layanan lain yaitu kebutuhan sembako dan pinjaman uang untuk kebutuhan sekolah anak anaknya disediakan oleh koperasi. Selain itu para peternak yang membutuhkan layanan kesehatan, maka koperasi telah memiliki layanan kesehatan khusus untuk para peternaknya.

4. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas, maka simpulannya adalah sebagai berikut:

- (1). Hal-hal yang di fasilitasi oleh KPSBU adalah sebagai berikut;
Menyalurkan susu dari peternak ke industri susu; Membantu peternak dalam supplay bahan makanan sapi; Membantu peternak dalam pengadaan peralatan dan sarana pada kandang sapi; Membantu peternak secara gratis dalam penyediaan tenaga medis, obat-obatan gratis, dan suntik kawin gratis; Melakukan monitor 24 jam atas kesehatan ternak sapi milik anggota KPSBU dengan dokter hewan dan mantra hewan; Memberikan santunan dana kematian maupun pencurian ternak sebesar Rp6.000.000; Memberikan bantuan biaya melahirkan Cesar Rp. 6.000.000 dan biaya melahirkan normal 2 juta kepada para istri peternak; Memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga kepada peternak yang

membutuhkan dana tanpa jaminan dan tanpa bunga dengan aturan maksimal 5 Juta; Memberikan pembinaan rutin kepada seluruh peternak dalam upaya peningkatan produksi susu; Membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun kepada seluruh anggota KPSBU; (2). Yang dilakukan anggota KPSBU untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPSBU di Bandung Utara, Propinsi Jawa Barat, adalah Menjaga kualitas susunya, agar tidak merusak mesin; Ada simpanan pokok Rp. 50.000 sekali bayar; Simpanan wajib Rp. 10 per liter (tidak boleh diambil selama jadi anggota KPSBU) dan simpanan mana suka Rp.5.000 per bulan.

Dengan adanya koperasi ini, masyarakat adat Sunda tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan susu sapi segar yang diambil setiap pagi dan sore hari. Kehidupan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan adatnya melalui Koperasi peternak KPSBU.

5. Ucapan Terimakasih

Trimakasih Kepada Kemenristek BRIN yang telah mendanai penelitian kami. Terimakasih Kepada Pihak Rektorat karena diberikan kesempatan dalam menggunakan fasilitas kampus.

6. Daftar Rujukan

- Nafziger EW. *Economic Development*. 2012. Epub ahead of print 2012. DOI: 10.1017/CBO9781139028295.
- Bigsten A. Determinants of the evolution of inequality in Africa. *J Afr Econ* 2018; 27: 127–148.
- Sabirin. UMKM, MEA, Pembangunan Ekonomi. *J Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah* 2016; 1: 41–50.
- Todaro M., Smith S. *Economic Development*. 2012. Epub ahead of print 2012. DOI: 10.1177/089124240001400105.
- Pratap S, Quintin E. The Informal Sector in Developing Countries: Output, Assets, and Employment. In: *Personal Wealth from a Global Perspective*. 2009. Epub ahead of print 2009. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199548880.003.0018.
- LeRoy Miller R. Business Law Today: The Essentials. In: *South-Western Cengage Learning*. 2011, p. 127.
- Lambing P dan CRK. *Entrepreneurship*. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2000.
- Beets WC. *Raising and Sustaining Productivity of Smallholder Farming Systems in the Tropics*. Holland: AgBe Publishing, 1990.
- Budi SP. Relevansi Dan Aplikasi Aliran Ekonomi Kelembagaan. *J Ekon Pembang* 2008; 9: 46–60.
- Erani YA. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Gamage, H.R. Cameron, D. & Woods E. Are Sri Langkan Entrepreneurs Motivated by the Need for Achievement? In: *Presented at the 9th International Conference on Sri Lanka Studies, 28th – 30th November 2003*. Sri Lanka: Matara, 2003.
- Saffu K. The Role and Impact of Culture on South Pacific Island Entrepreneurs, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*. 2009..

